

**PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI WILAYAH
PERBATASAN SEBAGAI UPAYA PEMUTUSAN MATA RANTAI
PEREDERAN GELAP NARKOTIKA
DI INDONESIA**

SRI WIJAYANTI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifnya pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan oleh warga negara asing sebagai upaya meminimalkan masuknya narkotika ke wilayah Indonesia. Dan untuk mengetahui jenis pidana yang diterapkan kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika. Dengan adanya ketentuan pemberatan pidana khusus warga negara asing memberikan efek jera. Di samping itu, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori negara hukum. Negara hukum menjadi cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang serba teratur, tertib dan saling menjaga tegaknya masing-masing hak di antara sesama anggota masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. studi yang dilakukan oleh legal science pada umumnya dapat dikatakan bersifat normative, artinya hampir selalu mencari norma-norma hukum yang sebaiknya berlaku bagi suatu keadaan tertentu, di dalam menghadapi suatu keadaan atau situasi di dalam realitas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan oleh warga negara asing belum secara optimal dapat meminimalkan peredaran narkotika karena diperlukan peningkatan upaya kerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia serta masih dibutuhkan sinergitas antar lembaga dan kementerian dalam memberantas sindikat narkotika jaringan internasional yang masuk melalui “pintu-pintu tikus” dari jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jenis pidana yang patut diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana mati dikarenakan kejahatan narkotika termasuk sebagai kejahatan *extra ordinary* yang melibatkan sindikat jaringan internasional. Kendala-kendala dalam pemberantasan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan adalah terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian, terutama Polri, BNN dan TNI, serta diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama terkait dengan pengaturan zat psikoaktif baru, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana, penguatan aparat penegak hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pengaturan tim asesmen terpadu, dan pemanfaatan harta kekayaan/harta benda hasil tindak pidana narkotika.

**ERADICATION OF NARCOTICS SURVIVORS IN LIMITATION AREAS AS
EYE DECISION EFFORTS OF DRIED CHAIN
IN INDONESIA**

SRI WIJAYANTI

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effectiveness of combating narcotics smuggling in the border region by foreign citizens as an effort to minimize the entry of narcotics into Indonesian territory. And to find out the type of crime that is applied to foreign nationals who carry out narcotics crimes. With the provision of special criminal sanctions, foreign citizens have a deterrent effect. In addition, to find out the obstacles faced by law enforcement officials in eradicating drug smuggling in the border region.

The theory used in this study is the theory of law enforcement and legal state theory. The rule of law becomes a mirror of society that ideally wants an orderly, orderly and mutually maintaining life for each of the rights among fellow members of society.

The research method used in this thesis is normative legal research, namely research that is intended to examine the principles and principles of law. studies carried out by legal science in general can be said to be normative, meaning almost always looking for legal norms that should apply to a particular situation, in facing a situation or situation in reality.

The results of this study conclude that the eradication of narcotics smuggling in border areas by foreign citizens has not optimally been able to minimize narcotics circulation because it requires an increase in collaborative efforts with neighboring countries that are directly adjacent to Indonesia and synergy between institutions and ministries is needed to eradicate international network narcotics syndicates. enter through "rat doors" from land and sea routes in the border region in Indonesia, especially in West Kalimantan and the Riau Islands which are directly adjacent to Malaysia. The type of crime that should be applied to the perpetrators of narcotics crimes that carry out smuggling based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is capital punishment because narcotics crimes are included as extra ordinary crimes involving international network syndicates. Constraints in combating narcotics smuggling in the border region are the limited number of law enforcement officers, the lack of optimal coordination and cooperation between institutions and ministries, especially the National Police, National Narcotics Agency and the TNI, and revision of Law No. 35 of 2009, especially related to the regulation of substances new psychoactive, improvement of the formulation of criminal provisions, strengthening of law enforcement officers criminal acts of narcotics and narcotics precursors, regulation of integrated assessment teams, and utilization of assets / assets resulting from narcotics crimes.